

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional merupakan kehendak seluruh bangsa untuk terus menerus melakukan peningkatan terhadap taraf kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan yang layak dan memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam proses mewujudkan cita-cita bangsa untuk mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Sebuah negara dapat dikatakan sukses dalam pembangunan nasional apabila memiliki banyak lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat kemiskinan dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Namun untuk mengatur semua itu negara harus cerdas dalam mengelola dan mengatur sistem ekonomi dan memanfaatkan apa yang sudah dimiliki negara tersebut agar dapat memiliki nilai ekonomis.

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang dihadapi semua negara terlebih Indonesia. Kemiskinan mampu menjadikan masalah yang melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia itu sendiri. Seseorang dikatakan miskin jika memiliki standar hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.<sup>1</sup>

Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di pedesaan. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan

---

<sup>1</sup> Suparlan. Parsudi. *Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan Untuk Antropologi*. (Jakarta: Sinar Harapan dan Yayasan obor Indonesia, 1984). Hal 12

aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan. Pemerintah dapat mengatur, mengawasi dan memberi pengarah intensif agar pelaku ekonomi dapat berperan secara optimal untuk kepentingannya sendiri tanpa mengabaikan tanggungjawabnya kepada pemerintah dan masyarakat. Perkembangan perekonomian merupakan salah satu penopang suatu daerah untuk mencapai potensi setiap daerah tersebut.

Badan Pusat Statistik Indonesia menemukan bahwa perbandingan kemiskinan antara masyarakat di perkotaan dan pedesaan masih tinggi. Pada Maret 2019, presentase penduduk miskin di kota besar sebesar 6,69%, sementara yang ada di pedesaan mencapai dua kali lipat yaitu 12,85%.<sup>2</sup> masyarakat pedesaan mayoritas mata pencahariaannya sebagai petani karena Indonesia merupakan negara agraris. Teknik yang dilakukan dalam bercocok tanam juga masih tradisional, akibatnya hasil panen yang dihasilkan lebih rendah jika dibandingkan dengan negara maju yang sudah memiliki tehnik pertanian modern.

Aktivitas pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan berbagai model dan nilai-nilai untuk memperkuat prinsip pembangunan perdesaan. Sebagai pemerintah wilayah desa yang memiliki otonom penuh, untuk menjalankan dan mengembangkan pemerintahannya sendiri. Maka desa harus bisa mengelola, mengembangkan dan mengarahkan masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan yang sesuai potensi desa tersebut. Desa bisa menjadi pusat sentral pemenuhan kebutuhan masyarakat, jika masyarakat bisa saling bekerja sama untuk saling bekerja sama membangun desa, misalnya dengan meningkatkan mutu pertanian, meningkatkan kualitas air bersih, meningkat dunia usaha/bisnis sesuai potensi desa.<sup>3</sup>

Berbagai program telah diupayakan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik oleh pemerintah, maupun organisasi pemerintah.

---

<sup>2</sup> <https://www.bps.go.id/> diakses pada 29 Maret 2020 pukul 21.19 WIB

<sup>3</sup> Diakses Melalui <https://www.lihatdesa.com/2018/03/badan-usaha-milik-desa-bersama.html>, tanggal 13 Februari 2020, pukul 18.28 WIB

Sebagai upaya serius dalam meningkatkan efektivitas penekanan angka kemiskinan, pemerintah telah memiliki konsep penanggulangan kemiskinan secara terpadu dengan basis pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat sebagai subjek penanggulangan kemiskinan berbasis kecamatan yaitu PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang dirintis pada tahun 2001 dan dibentuk juga kelembagaan yang berada pada tingkat kecamatan seperti UPK (Unit Pengelola Kegiatan) dan membentuk pula BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa).

Keberhasilan program tersebut akhirnya dilanjutkan pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2007 yang tepatnya diresmikan tanggal 1 Mei 2007 dengan perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan pemerintah mengkonsepkan sebuah program bantuan masyarakat, hal ini sesuai dengan landasan konstitusional UUD No. 25 Tahun 2004 yang mengarah pada pembangunan di pedesaan. Yang sumberdananya berasal dari pemerintah, sehingga masyarakat hanya merealisasikannya. Namun pada era berakhirnya kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, program impian ini juga berakhir. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM Mandiri Pedesaan) itu sendiri dimulai dari sejak 2007 dan berakhir pada tahun 2014 sehingga dari program ini meninggalkan banyak aset yang tersisa.<sup>4</sup>

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang merupakan hasil evolusi PNPM-MPd, harus dipandang sebagai peluang atau kesempatan bagi Pemerintahan Desa menjadi salah satu sumber pembiayaan Pembangunan Desa dan sebagai salah satu Pilar Pembangunan Desa. Mewujudkan Desa Mandiri yang diamanatkan dalam Undang-Undang Tentang Desa, harus ditempuh dengan upaya yang terus menerus untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa sebagai Hak Otonomi Desa dalam

---

<sup>4</sup> Risca Arih Purnama dan Algifari. *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Tanah Makmur*, (Pemangkih Baru.2010)hal 2

pengelolaan sumber pembiayaan untuk Pembangunan Desa. Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) salah satunya dapat dilakukan dengan Penguatan kelembagan Badan Kerjasama Desa (BKD) atau Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai badan yang melaksanakan hasil evolusi PNPM–MPd dalam wadah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) di tingkat Kecamatan.<sup>5</sup>

Pasal 92 ayat 3 UU No.6/2014 tentang desa mengatur tentang kerjasama antar desa (BKAD) yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa. UU no.6 tentang desa juga mengatur secara umum peran BKAD dalam melaksanakan kerjasama antar desa, terutama pembangunan antar desa.<sup>6</sup> BKAD berperan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa. Pada prinsipnya BKAD dibentuk oleh sejumlah desa yang mempunyai kesadaran untuk kolaborasi/kerjasama antar desa dalam mengelola sumberdaya bersama. UU desa juga mengatur secara fakultatif bahwa dalam melaksanakan pembangunan antar desa, BKAD dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan. Misalnya 4 desa dalam satu kecamatan membutuhkan data profil SDA kawasan perdesaan yang bermanfaat bagi pembangunan antar desa.

Gabungan dari beberapa desa tersebut adalah BUMDesma yang hendak memanfaatkan data profil kawasan pedesaan untuk pemetaan potensi usaha ekonomi bersama BKAD dengan membentuk kelompok/lembaga yang dikhususkan menangani data profil SDA kawasan pedesaan dan di bahas melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) dan cukup ditetapkan dengan peraturan bersama kepala desa. Cara kerja BUMDesma adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, tetapi tetap berstandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDesma akan berfungsi sebagai

---

<sup>5</sup> <http://indconsult.blogspot.com/2015/09/aspek-hukum-transformasi-upk-dana.html>

diakses pada tanggal 31 Maret 2020 pukul 19.30 WIB

<sup>6</sup> Pasal 92 ayat 3 UU No.6/2014 Tentang Desa

pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.<sup>7</sup>

Kebijakan pemerintah yaitu dengan adanya perundang-undangan pasal 1 angka 6 UU no. 6/2014 tentang Desa “ Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pengertian BUMDesa dalam UU No.6/2014 tentang desa tidak terletak pada kehebatan bumdes untuk mencetak laba besar, keuntungan miliaran, atau kunjungan wisatawan ke desa<sup>8</sup>

Panduan bumdesma ini dapat digunakan sebagai pegangan langsung bagi sejumlah desa yang bekerjasama membentuk atau mendirikan badan usaha milik desa bersama dengan tujuan guna mendorong dan tumbuhnya bumdesma secara kokoh, mandiri dan berkelanjutan untuk wadah konsolidasi dan kolaborasi antardesa dalam bidang ekonomi sehingga skala ekonomi dan daya saing ekonomi desa menjadi lebih besar dan kuat.<sup>9</sup>

Cara kerja BUMDesma adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, tetapi tetap berstandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDesma akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.<sup>10</sup> BUMDesma sangat berkontribusi bagi masyarakat, karena dengan adanya

---

<sup>7</sup> Herry Komaroseid, Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2016), hlm. 3

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 6 UU No. 6 tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama.

<sup>9</sup> Diakses Melalui, <http://www.berdesa.com>, tanggal 13 Februari 2020, pukul 18.32 WIB

<sup>10</sup> Herry Komaroseid, Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2016), hlm. 3

BUMDesma bisa membantu masyarakat seperti memberikan pinjaman dana dalam mendirikan usaha yang dikelola oleh masyarakat dan dapat membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan

Di kabupaten Tulungagung terdapat 13 BUMDesma yang meliputi Kecamatan Sendang, Bandung, Gondang, Karangrejo, Pucanglaban, Tanggunggunung, Pakel, Besuki, Kalidawir, Rejotangan, Campurdarat, Ngantru, dan Sumbergempol.<sup>11</sup> Dari beberapa BUMDesma yang ada di Tulungagung, tidak semua berjalan hingga sekarang karena kurang maksimalnya pengelolaan dana dan kurangnya kesadaran masyarakat. Dari kesekian BUMDesma yang ada di Tulungagung, BUMDesma Tanggunggunung menduduki peringkat kedua dengan total aset ±Rp.13.280.000.000,- (Desember 2019) setelah BUMDesma Kecamatan Sendang. Pembentukan BUMDesma Tanggunggunung pada tahun 2017 yang merupakan transformasi dari hasil PNPM-MPd ini yang mencakup 7 desa yaitu desa Ngepoh, Tenggarejo, Pakisrejo, Ngrejo, Tanggunggunung, Kresikan dan Jengglunharjo.

BUMDesma adalah sebagai wadah pemeliharaan/melestarikan dan mengembangkan aset masyarakat berupa pinjaman dana bergulir yang dikelola dengan cara simpan pinjam atau *microfinance*. Pinjaman bergulir ini difokuskan kepada masyarakat yang ingin meminjam modal dengan suku bunga yang lebih rendah daripada bank. Dengan adanya kegiatan ini masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas ekonomi dan kehidupannya. Dana yang terkumpul pada tahun 2014 sebesar Rp 1.627.200.000,00-. Dan darisitulah digunakan sebagai modal awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung yang terus berkembang hingga saat ini. Dalam perkembangan dana bergulir masyarakat (DBM) jumlah perkembangan kelompok sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> <http://dpmd.jatimprov.go.id/katalogttg/item/bumdesma> diakses tanggal 2 April 2020 pukul 6.24 WIB

**Tabel 1.1**

Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang aktif 2019

No	Desa	Jumlah kelompok		Total
		SPP	UEP	
1	Ngrejo	31	42	93
2	Jengglungharjo	9	13	22
3	Kresikan	7	10	17
4	Tanggunggunung	10	16	26
5	Ngepoh	9	43	52
6	Tenggarejo	5	22	27
7	Pakisrejo	9	39	48
Total		80	205	285

Dana bergulir ini diharapkan dapat membantu peningkatan kinerja usaha sehingga dapat menghasilkan manfaat kepada pemiliknya.<sup>12</sup> Dana pinjaman yang bergulir untuk KSM itu terbuka sesuai usulan kegiatan yang sifatnya membangun masyarakat kearah yang lebih baik meningkatkan kesejahteraan dan melibatkan masyarakat miskin. Karena peluang masyarakat miskin lebih besar dengan usaha-usaha yang butuh tambahan modal yang menghambat berkembangnya ketrampilan masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman. Pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan melalui SPP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) dan UEP (Usaha Ekonomi Produktif) guna melaksanakan penanggulangan kemiskinan. Jenis usaha yang dikembangkan pemanfaat dengan menggunakan dana SPP dan UEP yaitu:

**Tabel 1.2**

Jenis usaha yang dikembangkan melalui dana perguliran di kecamatan Tanggunggunung

---

<sup>12</sup> Nana eriyana, Analisis Kinerja Pengelolaan Dana Bergulir UPK-LKM Citra Mandiri Kelurahan Banjarsari Kota Metro, skripsi tahun 2014

No	Jenis Usaha	Contoh Usaha
1	Perdagangan	Dagang baju, kios, warung,dll
2	Pertanian	Tanaman pangan (jagung,padi, kacang ,dll)
3	Peternakan	Ternak puyuh, ayam, kambing, sapi, dll
4	Jasa	Salon, tempat fotocopy, counter, dll
5	Industri rumah tangga	Membuat keripik pisang, keripik ubi, membuat sale pisang, nasi jagung kering, dll

Tetapi tidak semua dana perguliran tersebut digunakan untuk kegiatan yang produktif, ada sebagian yang menggunakan dana pinjaman tersebut untuk kegiatan yang konsumtif. Permasalahan ini tentunya diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasinya, mengingat pinjaman yang diberikan BUMDesma adalah bentuk keseriusan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, salah satu yang menyebabkan permasalahan tersebut adalah kurangnya pera BUMDesma serta lemahnya sumberdaya, kesadaran pada masyarakat, hal tersebut dapat dibuktikan dengan ketidaktahuan masyarakat terhadap pinjaman pada BUMDesma serta adanya penyimpangan penggunaan pinjaman oleh anggota kelompok.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai “Efektivitas Pinjaman Dana Bergulir pada BUMDesMa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Tanggunggunung (Study kasus BUMDesma Tanggunggunung).

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dari latar belakang diatas yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. BUMDesma merupakan program pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang tergolong masih baru.
2. Lemahnya SDM terhadap regulasi.

3. Masih belum optimal dalam pemanfaatan pinjaman.

### **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan fenomena permasalahan dalam latar belakang di atas maka fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas program pinjaman dana bergulir pada BUMDesMa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Kecamatan Tanggunggunung (Study Kasus BUMDESMA Tanggunggunung)?
2. Problem/kendala apa yang dihadapi pada program pinjaman dana bergulir pada BUMDesMa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat?
3. Solusi apa saja yang dilakukan BUMDesma Tanggunggunung dalam mengatasi kendala pada program pinjaman dana bergulir?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan efektivitas program pinjaman dana bergulir pada BUMDesma Dalam meningkatkan ekonomi Masyarakat Kecamatan Tanggunggunung (Study Kasus BUMDESMA Tanggunggunung).
2. Untuk mendeskripsikan problem/kendala yang dihadapi BUMDesma dalam program pinjaman dana bergulir.
3. Untuk mendeskripsikan solusi apa saja yang dilakukan BUMDesma dalam mengatasi problem/kendala dalam program pinjaman dana bergulir.

### **E. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian tentang efektivitas program pinjaman dana bergulir pada

BUMDesMa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Kecamatan Tanggunggunung. Dengan subjek penelitian di BUMDesma Tanggunggunung

## **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini yang dapat dijadikan harap bagi penulis adalah:

### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan acuan bagi penelitian yang sejenis dan menambah informasi dan wawasan ilmu untuk masyarakat mengenai Efektivitas Program Pijaman Dana Bergulir Pada Bumdesma Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Tanggunggunung (Study Kasus BUMDESMA Tanggunggunung).

### **2. Manfaat Secara Praktis**

#### **a. Lembaga**

Semoga penelitian ini juga dapat digunakan atau berguna untuk wacana, rujukan dan referensi dalam meningkatkan kualitas dalam bidang perekonomian merujuk pada suatu hasil penelitian-penelitian yang teorinya itu telah ada di lapangan.

#### **b. Akademis**

Semoga penelitian ini juga dapat menambah daftar keilmuan atau daftar pustaka bagi perpustakaan.

#### **c. Peneliti Selanjutnya**

Sebagai tambahan referensi yang nantinya akan dapat memberikan perbandingan atau kontribusi dalam mengadakan penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang.

## **G. Penegasan Istilah**

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

### **1. Definisi Konseptual :**

- a) Efektivitas Menurut Adisasmita adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.<sup>13</sup>
- b) Pinjaman dana bergulir merupakan pinjaman yang diberikan kepada masyarakat miskin melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan dana tersebut diperoleh dari APBD yang dipinjamkan kepada usaha mikro, koperasi, dan usaha menengah sebagai fasilitas pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Dana bergulir selain bersumber dari APBD juga berasal dari laba dari pinjaman dana bergulir itu sendiri. Jadi laba yang diperoleh kemudian digulirkan kembali ke masyarakat.<sup>14</sup>
- c) Badan Usaha Milik Desa Bersama / BUMDesma merupakan badan usaha yang melakukan kerja sama dan membuat peraturan bersama kepala desa untuk mendirikan badan usaha sesuai potensi yang ada didesa tersebut
- d) Ekonomi menurut Henry Faisal adalah kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka ekonomi merupakan kegiatan taraf hidup untuk mencapai kebutuhan hidup secara materi<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Adisasmita, Rahardjo. *Pengelolaan pendapatan & anggaran daerah.* (Jakarta: Graha Ilmu, 2011), hal 170.

<sup>14</sup> Upajiwa Dewantara. *Pinjaman Bergulir, Kredit Macet serta Efek Moderasi Pendampingan* Vol 1 no 1 Juni 2017. Hal 16

<sup>15</sup> Henry Faisal, *Ekonomi Media*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010) hal. 2

## **2. Definisi Operasional**

Dari definisi secara konseptual dapat dipahami bahwa maksud dari judul proposal skripsi ini penulis ingin memahami bagaimana efektivitas program pinjaman dana bergulir pada BUMDesMa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat ( Study Kasus Bumdesma Tanggunggunung) serta mejadikan acuan agar BUMDesMa bisa lebih optimal dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **1. Bagian Awal**

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, Halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran dan halaman abstrak

### **2. Bagian utama**

Terdiri dari beberapa bab:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara singkat apa yang akan dibahas dalam skripsi yaitu dalam bab ini akan menguraikan tentang (a) Latar Belakang Masalah, (b) Rumusan Masalah, (c) Tujuan Penelitian, (d) Manfaat Penelitian, (e) Penegasan Istilah, (f) Sistematika Penulisan Skripsi

#### **BAB II : KAJIAN TEORI**

Pada bab ini menjelaskan mengenai uraian tentang kajian teori atau buku-buku, jurnal yang berisi teori-teori besar (Grand Theory) dan teori-teori yang dihasilkan oleh peneliti terdahulu terkait efektivitas BUMDESMA dalam pera peningkatan usaha dan ekonomi masyarakat.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, serta tahap-tahap penelitian untuk merancang sistem yang dilakukan dalam penelitian ini mengenai Efektivitas Program Pijaman Dana Bergulir pada BUMDesma Dalam meningkatkan pendapatan Masyarakat (Study Kasus BUMDESMA Tanggunggunung)

#### BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan hasil pemaparan data yang berkaitan dengan judul Efektivitas BUMDESMA dalam Peran Peningkatan Ekonomi dan Usaha Masyarakat Kecamatan Tanggunggunung

#### BAB V PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan tentang penemuan-penemuan di lapangan yang kemudian di bandingkan dengan apa yang selama ini ada dalam teori. Kemudian data tersebut dianalisis sehingga mendapatkan hasil data yang valid dari penelitian yang dilakukan BUMDesMa dalam peningkatan usaha dan ekonomi masyarakat Tanggunggunung

#### BAB VI PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penelitian yang akan menunjukkan pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan ini. Bagian ini berisi kesimpulan dan saran. Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.